

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND GOOD GOVERNANCE ON REGIONAL GOVERNMENT PERFORMANCE ON KERINCI DISTRICT**

**Elex Sarmigi<sup>1</sup>, Maryanto<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci

Email: [elexsarmigi@gmail.com](mailto:elexsarmigi@gmail.com)

Program Studi Akuntansi STIE Sakti Alam Kerinci

Email : [maryantoyanto1974@gmail.com](mailto:maryantoyanto1974@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Kerinci. Populasi penelitian ini adalah karyawan di Kabupaten Kerinci, menggunakan *purposive sampling*. Jumlah responden sebanyak 75 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Keuangan Daerah dan *Good Governance* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Kerinci. Kontribusi pengaruh Manajemen Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Kerinci adalah 51% dan 49% sisanya dijelaskan oleh sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata kunci: Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance*, Kinerja Pemerintah**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Effect of Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci Regency. The population of this study is employees at the Kerinci Regency, using the purposive sampling. The number of respondents in this study amounted to 75 person. Data was collected by a questionnaire and data analysis technique used multiple regression. The results of the study show that Regional Financial Management and Good Governance each partially has an effect on Government Performance in Kerinci District. Simultaneously there is a significant influence between Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci District. The magnitude of the influence of Regional Financial Management and Good Governance on Government Performance in Kerinci District was 51%. While the remaining 49% is explained by other causes that were not examined in this study.*

**Keywords: Regional Financial Management, Good Governance, Government Performance**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD. tentang Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lalu adanya perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014. Kemudian serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber – sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, sehingga dalam hal mengatasi

permasalahan daerah, wewenang otonomi daerah sangat diprioritaskan.

Kinerja merupakan suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja pada pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja periode yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi pemerintah untuk periode berikutnya.

Kemudian menurut Mardiasmo (2007) penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga hal, yaitu: membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinya, dan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Ditambahkan lagi oleh Mardiasmo (2007: 44) bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sasaran dan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi serta menentukan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas pemerintah daerah serta pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja merupakan ukuran tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi dan seberapa baik kinerjanya.

Menurut pendapat Irvan (2013) menyebutkan bahwa kinerja juga menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan *output* yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dikarena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kerinci yaitu mengacu pada PP Nomor

58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian diperjelas dan dijabarkan kembali dalam Peraturan Bupati Kerinci No 24 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci.

Untuk *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintah itu sendiri, di pemerintah Kabupaten Kerinci yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fenomena yang ada, Bupati Kerinci Bapak H. Adirozal. Pada tanggal 25 Januari 2018, menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 bertempat di Denpasar Provinsi Bali, sebagai Pembina Umum Terbaik Karang Taruna kabupaten. Penghargaan ini diserahkan Menteri Sosial RI saat itu, Dr. drs. HM. Idrus Marham, M.Sc., bersama Pengurus Nasional Karang Taruna, H. Didik Mukrianto, S.H., M.H. kemudian pada saat bersamaan, Kabupaten Kerinci juga menerima penghargaan atas prestasi dalam akuntabilitas kinerja tahun 2017 dengan predikat nilai B (baik) dan meraih Opini WTP. Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI saat itu, H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci tahun 2018 yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. LHP atas LKPD Kabupaten Kerinci tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Hery Ridwan, dan diterima oleh Bupati Kerinci Adirozal dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Arpan Kamil, di Kantor BPK Perwakilan Jambi. Meskipun ada beberapa catatan-catatan hasil audit yang disampaikan oleh pimpinan BPK, namun tidak terlalu banyak berkaitan dengan keuangan dan hal tersebut akan segera ditindak lanjuti. (Sumber : [Tribunjambi.com](http://Tribunjambi.com))

WTP ini sangat berhubungan dengan *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan karena dalam penghargaan ini disebutkan diatas memperoleh prestasi akuntabilitas kinerja, dimana akuntabilitas adalah merupakan salah satu bagian atau indikator dari *good governance*. Dengan hal diatas maka, pemerintah daerah kabupaten kerinci boleh dikatakan berhasil dalam hal pengelolaan keuangan, dan menata tata kelola pemerintahnya serta efektivitas kinerja pemerintahannya.

Maka berdasarkan latar belakang dan fenomena dan hal-hal yang dijelaskan diatas maka peneliti mengangkat atau mengambil judul yaitu “

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci “.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka, rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dan berapa besarnya?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan juga rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dan berapa besarnya.

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Alasan dipilih objeknya adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah apakah telah sesuai aturan yang berlaku dan tata kelola pemerintah (*good governance*) apakah telah sesuai atau baik. Kemudian kedua variabel tersebut nantinya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Adapun variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi sebuah perubahan atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono (2014:59). Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah

Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance*.

## 2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen atau variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono (2014:59)). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Dalam proses penelitian ini di mulai dari peneliti mengajukan pengujian instrumen penelitian, menyebarkan kuesioner, hingga analisis data. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai identitas responden yang meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan usia. Dan hasil dari penyebaran kuesioner tersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan alat bantu statistika yaitu SPSS.

## Populasi Dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bagian terkait yang bisa mewakili penelitian ini. Dan teknik pengambilan sampelnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti bahwa sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/ Keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kerinci. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Staf Akuntansi/ Keuangan merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 orang dari 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masing-masing terdiri dari ada 3 responden,

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data yang diangkakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber ahli dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original tanpa melalui perantara, dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer dalam

penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang dibagikan kepada bagian-bagian yang terkait dalam penelitian ini yang ditentukan berdasarkan penilaian peneliti. Dan data sekunder yang diperoleh dari hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data teoritis atau data sekunder dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, catatan dan transkrip, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian langsung kelapangan dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa, Daftar Pertanyaan (*Quesioner*) yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para responden di objek penelitian.

## Definisi Operasional

1. Pengelolaan Keuangan Daerah : adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indikator pengelolaan keuangan adalah: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan.
2. *Good Governance* : sebuah sistem aturan, proses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik pada pemerintah pusat hingga ke satuan pemerintahan terendah. Variabel ini diukur berdasarkan: Partisipasi, Kepastian Hukum (*Rule Of Law*), Transparansi, Tanggung Jawab (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektifitas dan efisien, Akuntabilitas, Visi Strategis (*Strategic Vision*).
3. Kinerja Pemerintah : adalah sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang

kulaitas terukur. Indikator kinerja keuangan adalah : Indikator Masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Keluaran, Indikator Hasil, Indikator Manfaat, Indikator Dampak.

### Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:86) adalah "Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila jawaban Sangat Setuju  
Diberi nilai 5
- b. Apabila jawaban Setuju  
Diberi nilai 4
- c. Apabila jawaban Cukup Setuju  
Diberi nilai 3
- d. Apabila jawaban Tidak Setuju  
Diberi nilai 2
- e. Apabila jawaban Sangat Tidak Setuju  
Diberi nilai 1

### Uji Instrumen

#### 1. Uji Validitas

Menurut pendapat Arikunto (2008 : 64), mengatakan bahwa "Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat valid dari suatu instrumen. Suatu instrumen valid mempunyai validitas yang tinggi. Untuk mengetahui validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi *Product Moment*, yaitu :

$$R_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X^2)\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan :

R<sub>xy</sub> = Menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan

R = Koefisien validitas item yang dicari, dua variabel yang di korelasikan

X = Skor untuk pernyataan yang dipilih

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum X$  = Jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$  = Jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

$\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

N = Banyaknya responden

Kemudian Sugiyono (2011:126) mengatakan kriteria pengujian pengukuran validitas, yaitu sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. Kriterianya jika nilai hitung r lebih besar (>) dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid.
2. Membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. Kriterianya jika nilai hitung r lebih kecil (<) dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan tidak valid.

#### 2. Uji Realibilitas

Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Menurut pendapat Arikunto (2008 : 86) "realibilitas adalah ketetapan suatu tes dapat ditekankan pada objek yang sama untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya melihat kesejajaran hasil"

Pengujian reliabilitas dapat dikemukakan dengan rumus Cronbach's Alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum ob^2}{\sigma t^2} \right]$$

Keterangan:

r<sub>11</sub> : Reliabilitas instrument

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum ob^2$  : Jumlah varian butir

$\sigma t^2$  : Varian total

Kriteria pengujian dalam pengukuran reliabilitas menurut Nugroho dalam Sujianto (2009:97), yaitu sebagai berikut :

- A) Jika nilai Cronbach's Alpha (r<sub>11</sub>) > 0,60 maka item variabel dinyatakan reliabel atau valid.
- B) Jika nilai Cronbach's alpha (r<sub>11</sub>) < 0,60 maka item variabel dinyatakan tidak reliabel atau tidak valid.

#### Metode Analisis Data

##### Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, tulisan di media massa dan dokumen resmi lainnya.

### Deskriptif Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2014:13) metode penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisa deskriptif kuantitatif merupakan alat untuk meneliti dengan melakukan perhitungan tingkat pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Adapun bentuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau angket yang dirancang sendiri oleh penulis. Variabel-variabel dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert dimana setiap alternatif jawaban akan diberikan skor untuk lebih jelasnya mengenai ukuran nilai dari setiap alternatif jawaban atas pertanyaan.

### Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan untuk membahas masalah mengenai hal diatas adalah dengan menggunakan :

### Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2006:250), analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor preditor dimanipulasi ( dinaik turunkan nilainya). Model persamaan untuk analisa regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Kinerja Pemerintah

a : Konstanta

b1 b2 : Koefisiensi regresi

x1 : Pengelolaan Keuangan Daerah

x2 : *Good Governance*

e : Variabel gangguan / Error

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien regresi. Dalam penggunaan koefisien determinasi dinyatakan dalam persen sehingga harus dikalikan 100%. dengan rumus koefisien determinan Ridwan (2004:136).

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r = Koefisien Regresi antara Variabel X dan Variabel Y

### Uji Hipotesis

#### Uji t

Uji t adalah bagian uji statistik yang merupakan uji koefisien korelasi parsial yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Uji t dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai Signifikan

r<sup>2</sup> = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

Dengan dasar pengambilan keputusan, dengan membandingkan nilai t<sub>hitung</sub> dengan t<sub>tabel</sub>, sebagai berikut :

1. Jika t<sub>hitung</sub> ≥ t<sub>tabel</sub> : Hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance*) terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah) Kabupaten Kerinci.
2. Jika t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub> : Hipotesa nol diterima dan Hipotesa alternatif ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance*) terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah) Kabupaten Kerinci.

#### Uji F

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (Simultan) terhadap variabel-variabel dependen.

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

F<sub>hitung</sub> = nilai f yang signifikasi.

Kaidah pengujian signifikasi :

1. Jika F<sub>hitung</sub> ≥ F<sub>tabel</sub>, Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah dan Faktor *Good Governance* terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah) Kabupaten Kerinci.

2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Faktor Pengelolaan Keuangan Daerah dan Faktor *Good Governance* terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah) Kabupaten Kerinci.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Regresi Linear Berganda**

Untuk mengetahui persamaan analisis regresi linier berganda dari pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,968	8,091		,243	,808
Pengelolaan_Keuangan_Daerah	,295	,081	,323	3,670	,000
Good_Governance	,439	,072	,534	6,072	,000

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah

Dari tabel 1 di atas dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1,968 + 0,295 X_1 + 0,439 X_2$$

Dengan penjelasan dari persamaan di atas adalah:

1. Nilai dari  $a = 1,968$  artinya artinya jika variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* dianggap 0 (nol) atau tidak ada maka Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 1,968.
2. Nilai dari  $b_1 = + 0,295$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi

peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

3. Nilai dari  $b_2 = + 0,439$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari *Good Governance* adalah positif, semakin baik *Good Governance*, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

**Koefisien Determinasi**

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, maka dapat dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,714 <sup>a</sup>	,510	,497	7,49010

a. Predictors: (Constant), Good\_Governance, Pengelolaan\_Keuangan\_Daerah

*R Square* dapat disebut Koefisien Determinasi yang di dalam hal ini berarti besarnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebesar 51%. Sedangkan sisanya (100% - 51%), yaitu 49% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis**

**Uji t**

Untuk menguji signifikan pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Berdasarkan pada tabel 1 di atas dan dengan membandingkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance*) terhadap variabel dependen (Kinerja

Pemerintah Daerah) Dengan  $t_{\text{tabel}} = 1,99346$ . Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $3,670 > 1,99346$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $6,072 > 1,99346$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

hitung  $> t_{\text{tabel}}$  ( $6,072 > 1,99346$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

### Uji F

Untuk menguji signifikan pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci secara simultan dengan menggunakan uji F. sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Ringkasan Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4208,475	2	2104,238	37,508	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4039,312	72	56,102		
	Total	8247,787	74			

a. Dependent Variable: Kinerja\_Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Good\_Governance, Pengelolaan\_Kuangan\_Daerah

Dengan membandingkan  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya, terdapat pengaruh secara simultan antara Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Dengan  $F_{\text{tabel}} = 3,12$ . Sehingga dapat dianalisis Berdasarkan tabel 3 dari uji ANOVA atau F tes ternyata didapat  $F_{\text{hitung}} 37,508$  : dimana  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $37,508 > 3,12$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci

Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Putra, Erlina dan Sari (2016). *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Azlina dan Amelia (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Jayanti.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $3,670 > 1,99346$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $6,072 > 1,99346$ ) maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yaitu dapat dibuktikan dengan  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $37,508 > 3,12$ ).

4. Nilai dari  $b_1 = + 0,295$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari Pengelolaan Keuangan Daerah adalah positif, semakin baik Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Nilai dari  $b_2 = + 0,439$  artinya tanda positif mengartikan bahwa pengaruh dari *Good Governance* adalah positif, semakin baik *Good Governance*, maka terjadi peningkatan dari Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Besarnya Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci adalah sebesar 51%. Sedangkan sisanya yaitu 49% dijelaskan oleh faktor penyebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Saran

Berdasarkan bab pembahasan dan kesimpulan penelitian maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran yang ingin peneliti berikan yaitu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci agar bersama-sama meningkatkan konsistensi dalam penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terlaksana secara lebih baik dan optimal agar tidak menimbulkan kerugian pada negara.
2. Hendaknya setelah menganalisa peraturan mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka perlu ditinjau kembali, sehingga pengelolaan keuangan daerah lebih baik.
3. Dalam pengukuran kinerja sebaiknya menggunakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) daerah sehingga mencerminkan secara langsung kinerja pemerintah.
4. Hasil penelitian ini diharapkan agar seluruh pegawai terus mengembangkan kompetensinya secara terencana dan berkesinambungan sehingga mampu menciptakan *good governance*. Selanjutnya, berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini mendorong terwujudnya *good governance* sehingga berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

#### REFERENSI

- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra, (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi : 2. USU Press. Medan.
- Ghozali, Imam., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Ikhsan, Arfan dan Ishak Muhammad. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----,2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Ridwan.2004. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2004. Metode Penelitian. Bandung. Alfabeta

Soleh, Chabib. Suropto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Focus Media.

Usman dan Lukman Pakaya.2014.Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten None Bolango. Jurnal Akuntansi.

Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers

Wiranto, Tatang. (2012). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik.(Online). (diakses tanggal 6 Maret 2019). Tersedia di World

<http://jambi.tribunnews.com/2019/01/10/kerinci-4-kali-raih-wtp-prestasi-kabupaten-kerinci-tingkat-nasional-dan-provinsi-tahun-2017-2018>

<http://jambi.tribunnews.com/2019/01/10/kerinci-4-kali-raih-wtp-prestasi-kabupaten-kerinci-tingkat-nasional-dan-provinsi-tahun-2017-2018?page=2>

<http://jambi.tribunnews.com/2019/01/10/kerinci-4-kali-raih-wtp-prestasi-kabupaten-kerinci-tingkat-nasional-dan-provinsi-tahun-2017-2018?page=3>

<http://jambi.tribunnews.com/2017/12/22/bpk-temui-banyak-yang-tidak-beres-bahkan-masih-ada-spj-perjalanan-dinas-fiktif>

<http://skpknews.co/?p=3214>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5750>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5753>

<https://infokeuandaerah.wordpress.com/2012/07/24/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-daerah/>

<https://www.beritatransparansi.com/pengertian-pengawasan-keuangan-daerah-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>